

## PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

2019

PERDA KOTA MADIUN NO. 3 LD 2019 / NO. 2 SERI D, TLD NO 80, 66 HLM

### PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

**ABSTRAK** : Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, menegaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan arsip. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengelolaan kearsipan bukan saja dilaksanakan untuk kepentingan penyelamatan sejarah suatu daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari catatan sejarah nasional Indonesia. Penyelenggaraan kearsipan juga sebagai upaya untuk menjamin terciptanya arsip yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang andal, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 24 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Perencanaan, Organisasi Penyelenggaraan Kearsipan, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi Profesi Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Pembinaan, Sosialisasi dan Pengawasan Kearsipan, Sarana Dan Prasarana Kearsipan, Layanan Jasa Kearsipan; Pendayagunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, pembiayaan, Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana.

**CATATAN** : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019

- Penjelasan : 25 hlm